

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dampak negatif dari perubahan suhu ekstrim global terhadap penyediaan pangan sudah mulai dirasakan. Sebagai kawasan yang merupakan produsen sekaligus merupakan konsumen beras, serta kawasan yang rawan akan bencana alam, Negara-negara anggota ASEAN bersama 3 mitra kerjasamanya Jepang, Korea Selatan dan China secara resmi membentuk APTERR sebagai lembaga permanen pengelola cadangan beras untuk keperluan darurat Negara-negara anggotanya. Meskipun pasar merupakan lembaga yang efisien dalam mendistribusikan pangan, termasuk pada saat krisis, karena pelaku pasar dapat membayar asuransi untuk mengantisipasi terjadinya gejolak pasar. Namun, cadangan beras regional juga akan efektif jika tersedia dalam jumlah yang relatif kecil dan terdesentralisasi dalam suatu wilayah. Karena, pada kenyataannya Negara pengekspor beras juga merupakan Negara konsumen beras yang juga memerlukan jaminan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Dengan demikian baik Negara importir maupun Negara eksportir sama-sama menghadapi risiko kerentanan terhadap ketersediaan beras di pasar regional. Dalam kondisi inilah model pengelolaan cadangan beras regional dapat lebih efektif daripada jika pengelolaan cadangan beras hanya dilakukan oleh masing-masing Negara dikawasan.

Skenario atas bencana menunjukkan bahwa sebuah Negara mengalami kekurangan pangan dan pada akhirnya dapat memperoleh stok beras melalui perdagangan, meskipun dengan dampak keuangan yang luar biasa. Ini mungkin menyiksa sumber keuangan untuk pembeli, karena mereka tidak mampu untuk mendapatkan beras yang mereka butuhkan. Mengingat keterbatasan yang terkait dengan cadangan fisik, dibutuhkan pengembangan instrument berbasis pasar untuk mengatasi resiko harga tersebut, seperti bursa komoditas beras dan saham beras berjangka.

APTERR bisa berfungsi sebagai katalis untuk kerjasama yang lebih besar antara ASEAN dan tiga negara mitra kerajasamanya, dalam ketahanan pangan lebih umum, dan juga berpotensi dalam aspek lain dari sektor beras. Penekanan pada kerjasama dibawah APTERR dapat membangun kepercayaan disektor beras dikawasan ini, secara teori meningkatkan kepercayaan diri di sector ini akan mengarah pada perilaku perdagangan yang lebih terbuka dan stabil, bahkan selama periode krisis. Sebagai alat untuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah di sector beras, APTERR akan terbukti menjadi salah satu langkah penting dalam meminimalisir masalah kerawanan pangan pasca bencana di kawasan Asia Tenggara.

Keberadaan APTERR bagi Indonesia dapat dipandang sebagai suatu tambahan sumber daya bagi Cadangan Beras Nasional. Dengan tambahan biaya yang relatif kecil, Indonesia dapat mengakses bantuan beras dari APTERR untuk keperluan penanganan pasca bencana dan kondisi darurat lainnya, serta untuk bantuan penanganan masalah kemiskinan, dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Selama

periode tahun 2012, Indonesia telah mendapat manfaat dari bantuan beras APTERR untuk penanganan pasca bencana, penanganan masalah kemiskinan, serta penanganan masalah kerawanan pangan dan gizi di daerah. Setelah melalui pengalaman dan proses yang panjang dalam pembentukannya, maka APTERR pada saat ini telah mempunyai sistem pengelolaan dan mekanisme pemanfaatan cadangan beras regional yang sesuai dengan kebutuhan para anggotanya untuk mengantisipasi dan menangani keperluan darurat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa APTERR sebagai lembaga regional yang menangani masalah pangan pasca bencana tidak efektif, karena dari tiga program tier yang disediakan APTERR hanya satu program yang diimplementasikan di Indonesia pasca erupsi merapi, yaitu program bantuan kemanusiaan dibawah tier 3. Sedangkan program tier 1 dan 2 tidak berjalan, karena program tier 1 dan 2 membutuhkan mekanisme yang sulit, dimana Negara yang terkena bencana harus menyiapkan proposal, melakukan negosiasi dan persetujuan dari anggota, dewan dan sekretariat APTERR. Selain itu ketidak efektifan tier 1 dan 2 di Indonesia juga dikarenakan cadangan beras di Indonesia khususnya daerah terdampak bencana dapat menutupi angka kerawanan pangan. Meskipun program tier 3 berjalan, namun ketidak efektifannya terletak pada bantuan yang diberikan APTERR melalui Jepang sangat lama. Erupsi merapi terjadi pada tahun 2010 dan pemberian bantuan dilakukan tahun 2012.

## 4.2 Saran

Dalam pelaksanaan program APTERR di Indonesia untuk menangani masalah kerawanan pangan pasca bencana, masih terdapat kekurangan yang harus menjadi perhatian Negara-negara anggota APTERR khususnya pada mekanisme program tier 3. Dimana untuk pelepasan cadangan beras stockpiled pada program PAME dibutuhkan waktu 1 tahun, itupun jika tidak ada penggunaan dalam pelepasan cadangan beras stockpiled. Selain itu APTERR juga harus meningkatkan jumlah cadangan berasnya, karena rata rata Negara anggotanya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Peningkatan cadangan beras bisa ditingkatkan melalui komitmen atau kerjasama dengan organisasi-organisasi yang bergerak di sector pangan.